

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN  
AGROWISATA BELIMBING TASIKMADU DI DESA TASIKMADU  
KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN**

**Novi Yudianti**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tuban

[vidosmart04@yahoo.com](mailto:vidosmart04@yahoo.com)

**ABSTRACT**

Tuban Regency is one of regencies in East Java province with its slogan Tuban Bumi Wali. The main tourism in Tuban is Sunan Bonang Graveyard tourism and Syekh Maulana Ibrahim Asmoroqondi. By utilizing the high religious tourists visit pushed the County Government to develop agrotourism Tuban starfruit Tasikmadu to improve the economy of the local community. However, the results of observation and interviews with agrotourism Manager shows that Agrotourism Starfruit Tasikmadu hasn't been able to attract tourists to visit and become a tourist destination to its fullest. Therefore, we need to know the extent to which the implementation of development policy agrotourism starfruit Tasikmadu in order to maximize the potential of tourism. In addition, the study also aims to describe and analyze the supporting and restricting factors to the implementation of the policy. Researchers are using a policy implementation model George C. Edwards III with variable communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The method used is descriptive qualitative methods. The object of the research is starfruit Tasikmadu agrotourism in the village of Tasikmadu, district Palang, Tuban. Informants in this study are the parties involved in the implementation of development policy agrowisata star fruit Tasikmadu. This research using qualitative data analysis techniques. The results of this research: (1) implementation of policy development agrowisata starfruit Tasikmadu in Tasikmadu Village, District Palang, Tuban is already implemented but not optimal either from the aspect of communication, resources, disposition, and structure bureaucracy. (2) supporting factors was regulation, strategic layout, adequate infrastructure and facilities, the quality of the fruit flavours of starfruit is sweet and fresh, distinctive culinary Tuban and free tickets. While the restricting factors is there is no technical team, the status of ownership of land belonging to individuals, yet there is a SOP, on-site attractions, limited availability of starfruit that is not always abundant throughout the year, and the promotion of maximum yet.

**Keywords:** *Star fruit Agrotourism, Agrotourism Policy Development, Star fruit Tasikmadu.*

**PENDAHULUAN**

Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan slogan utamanya yaitu Tuban Bumi Wali. Obyek wisata andalan di Kabupaten Tuban adalah wisata religi Makam Sunan Bonang dan Syekh Maulana

Ibrahim Asmoroqondi. Berdasarkan data jumlah kunjungan wisatawan menurut Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban yang tercantum dalam Buku Tuban dalam Angka Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, jumlah kunjungan wisatawan selama tahun 2013 hingga tahun 2017 di Kabupaten Tuban menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.

**Tabel 1. Jumlah Kunjungan Wisata**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
2013	3.949.648
2014	4.201.627
2015	4.772.854
2016	5.108.680
2017	5.803.318

Menurut pernyataan Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban, jumlah wisatawan tersebut 75% merupakan wisatawan yang mengunjungi obyek religi makam Sunan Bonang dan makam Syekh Maulana Ibrahim Asmoroqondi. Kawasan agrowisata belimbing tasikmadu memiliki lokasinya yang berdekatan dengan makam Sunan Bonang dan makam Syekh Maulana Ibrahim Asmoroqondi. Kawasan agrowisata belimbing tasikmadu terletak di Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Pemerintah Kabupaten Tuban mengembangkan Agrowisata Belimbing Tasikmadu dalam Kawasan Agropolitan dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah. Hal ini ditandai dengan pembentukan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Lintang Tresno sebagai pengelola Kawasan Agrowisata tersebut sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban Nomor 188.45/25/KPTS/414.102/2018 tentang Penetapan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Lintang Tresno Dusun Pasekan Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Namun pada pelaksanaannya pengelolaan agrowisata belimbing tersebut tidak hanya dilaksanakan oleh POKDARWIS dan POKTAN Lintang Tresno juga melibatkan BUMDes setempat. Observasi dan wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti, diperoleh bahwa jumlah wisatawan yang mengunjungi kawasan Agrowisata Belimbing Tasikmadu hanya berkisar kurang dari 20 orang per hari. Sehingga dalam satu tahun hanya sekitar 7200 wisatawan yang mengunjungi agrowisata ini, sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah wisatawan religi yang ada di Kabupaten Tuban. Jumlah ini menunjukkan bahwa kawasan Agrowisata Belimbing Tasikmadu masih belum mampu menarik wisatawan untuk berkunjung dan menjadi destinasi wisata secara maksimal.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil focus penelitian implementasi kebijakan dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agrowisata Belimbing Tasikmadu di Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban”. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti merumuskan masalah, bagaimana Implementasi Kebijakan

Pengembangan Kawasan Agrowisata Belimbing Tasikmadu di Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban? Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agrowisata Belimbing Tasikmadu di Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban?

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Kebijakan Publik**

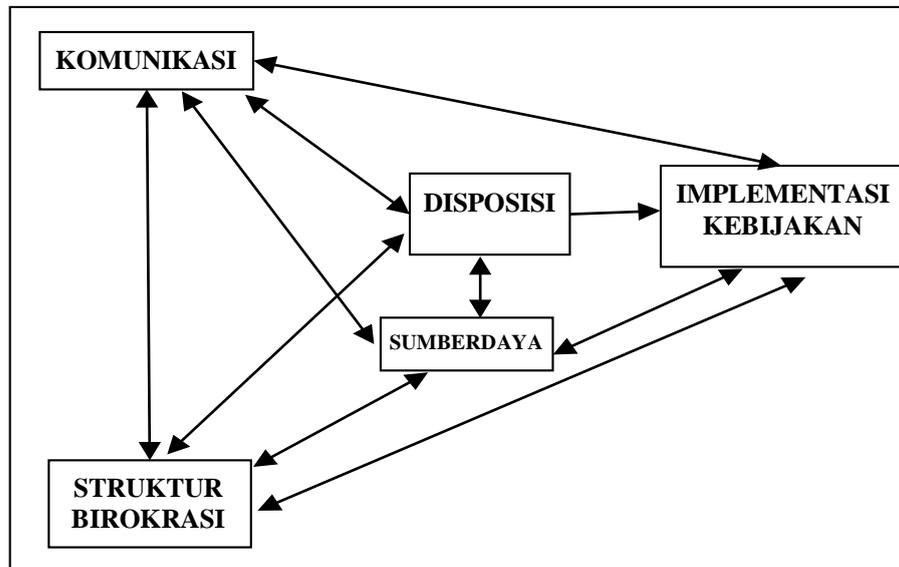
James Arderson menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok orang yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Kebijakan publik didefinisikan sebagai tindakan yang dipilih oleh sekelompok orang dan pemerintah untuk mengatasi permasalahan publik di suatu lingkungan dengan maksud dan tujuan yang telah ditentukan.

### **Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara atau langkah yang dilakukan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, oleh Mazmanian dan Sabatier (1983) disebut sebagai upaya melaksanakan keputusan (Ilham, 2014). Tahap implementasi sebuah kebijakan merupakan tahapan yang krusial, karena tahapan ini menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Tahap implementasi perlu dipersiapkan dengan baik pada tahap perumusan dan pembuatan kebijakan. Implementasi kebijakan dapat didefinisikan sebagai suatu proses kegiatan yang mengarah pada pelaksanaan kebijakan dimana kebijakan tersebut sudah direncanakan untuk kemudian diarahkan pada perwujudan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebelumnya telah direncanakan. Ada beberapa model implementasi kebijakan publik menurut para ahli kebijakan publik, diantara adalah model implementasi kebijakan publik menurut George C. Edwards III (1990), Charles O. Jones (1996), Donald Van Metter & Carl Van Horn (1975), dan Thomas R. Dye (1992). Peneliti menggunakan model implementasi kebijakan publik menurut George C. Edwards III.

### **Model Implementasi Kebijakan Publik menurut George C. Edwards III**

George C. Edwards III mengartikan implementasi sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan yang terletak diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan itu (*output, outcome*). Aktivitas implementasi menurut Edwards meliputi perencanaan, pendanaan, pengorganisasian, pengangkatan dan pemecatan pegawai, negosiasi dan lain-lain. Edwards III mengemukakan bahwa keberhasilan atau kegagalan model implementasi kebijakan yang dikembangkannya dipengaruhi oleh 4 (empat) variabel. Empat variabel diatas saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi. Hubungan keterkaitan antar variabel tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini



**Gambar 1** Hubungan antara variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dengan implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III dalam buku *Implementing Public Policy* (Edwards III, 1980: 148)

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kawasan Agrowisata Belimbing Tasikmadu di Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dengan obyek penelitian pada sumber daya, fokus komunikasi, kelembagaan, disposisi dan struktur birokrasi. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pihak yang paling mengetahui dan memahami serta terlibat dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kawasan Agrowisata Belimbing, yaitu: Kepala Subbidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tuban, Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban, Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban, Kepala Desa Tasikmadu selaku pemilik wilayah, Ketua Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Lintang Tresno, Ketua Kelompok Tani (POKTAN) Lintang Tresno dan Direktur BUMDes Tasmad Mandiri selaku pengelola kawasan agrowisata.

## PEMBAHASAN

Desa Tasikmadu terletak di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur. Desa Tasikmadu memiliki luas sekitar 229,2 hektar, terbagi atas 8 dusun, dengan batas wilayah utara Kelurahan Panyuran Kecamatan Palang, sebelah timur Desa Sumurgung Kecamatan Palang, sebelah barat dan selatan

Kelurahan Gedongombo Kecamatan Semanding. Desa Tasikmadu yang terbagi atas lahan permukiman dan perkebunan merupakan wilayah dekat kota yang masih memiliki suasana seperti pedesaan. Desa Tasikmadu mempunyai kawasan agrowisata kebun belimbing tasikmadu yang dapat menjadi tempat wisata alternatif bagi keluarga. Belimbing Tasikmadu yang dibudidayakan dalam kawasan agrowisata merupakan komoditas hortikultura unggulan dan telah mendapatkan Sertifikat Hak Paten dari Departemen Pertanian nomor 314/KPTS/SR.120/5/2007. Belimbing ini memiliki ciri khas, yakni rasanya manis seperti madu, tekstur dagingnya lembut, warnanya kuning kunir, berserat halus, airnya banyak dan berasa manis segar. Saat ini luas lahan kawasan agrowisata kebun belimbing Tasikmadu mencapai 69 hektar dengan kapasitas produksi 36.000 kilogram per hektar, total 2.484 ton per tahun.

Kawasan Agrowisata Belimbing Tasikmadu terletak pada lokasi yang strategis yaitu di sebelah selatan Jalan Raya Tuban-Paciran yang merupakan jalan nasional yang menghubungkan Provinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah, sehingga akses menuju lokasi agrowisata tersebut mudah dijangkau oleh wisatawan. Selain itu, akses menuju kawasan agrowisata belimbing tasikmadu juga dapat ditempuh melalui Perumnas Tasikmadu sekitar 2 km, terletak tepat di sebelah utara jalan Tuban-Babat. Kedua akses tersebut dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.

### **Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agrowisata Belimbing Tasikmadu di Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban**

George C. Edwards III mengemukakan bahwa keberhasilan atau kegagalan model implementasi kebijakan yang dikembangkannya dipengaruhi oleh 4 (empat) variabel. Variabel-variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

#### **1. Komunikasi**

Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu: a. Transmisi; Transmisi merupakan suatu proses penyampaian informasi antara pihak satu dengan pihak yang lain. Penyampaian komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan implementasi kebijakan yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyampaian komunikasi adalah adanya miskomunikasi (salah pengertian). Miskomunikasi ini terjadi disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan mengalami penyimpangan di tengah jalan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan pengembangan kawasan agrowisata belimbing tasikmadu telah berjalan dengan baik. Terkait proses komunikasi internal di dalam organisasi POKDARWIS/BUMDes Agrowisata Belimbing Tasikmadu tersebut maupun komunikasi dengan pihak lain (Kades/Dinas/Instansi lain) berjalan lancar namun komunikasi dengan masyarakat terkait promosi wisata belum maksimal. b. Kejelasan; Kejelasan merupakan indikator yang lebih mengarah pada sejauh mana informasi yang disampaikan oleh pelaksana kepada pihak lain secara jelas sehingga memberikan pemahaman kepada penerima informasi. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan pengembangan kawasan agrowisata belimbing tasikmadu terkait informasi pembinaan dari instansi lain

tentang pengelolaan POKDARWIS/BUMDes Agro-wisata Kebun Belimbing Tasikmadu telah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh semua anggota. c. Konsistensi; Konsistensi merupakan keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan yang perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan pengembangan kawasan agrowisata belimbing tasikmadu menggunakan teknik pelatihan dan koordinasi untuk mencari solusi terkait permasalahan yang dihadapi.

## **2. Sumber daya**

Terdapat empat indikator sumber daya, yaitu: a. Sumber Daya Manusia; Sumber daya manusia merupakan pelaksana implementasi kebijakan yang meliputi jumlah dan kemampuan dalam melakukan pengawasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan pengembangan kawasan agrowisata belimbing tasikmadu meliputi Bappeda, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban yang dilakukan secara rutin. b. Sumber Daya Anggaran; Sumber daya anggaran merupakan dana yang dibutuhkan untuk membiayai operasional pengembangan kawasan agrowisata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan pengembangan kawasan agro-wisata belimbing tasikmadu diperoleh dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, APBD Pemerintah Kabupaten Tuban, CSR dan swadaya masyarakat sebagai berikut:

**Tabel 2.**  
Bantuan Sumber Daya Anggaran Pengembangan Agrowisata

<b>Sumber Dana</b>	<b>Anggaran</b>
Pemerintah Kabupaten Tuban	Gapura dan Jalan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	250 juta 75 juta
Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Aula (Rp 198.000.000,-) 200 juta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	<i>Packing House</i>
CSR	Gapura jalan
Swadaya masyarakat	Kolam renang dan kios

c. Sumber Daya Peralatan; Sumber daya peralatan merupakan fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan implementasi kebijakan yang harus terpenuhi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana terkait budidaya belimbing tasikmadu telah tersedia, termasuk pompa dan *packing house*. Beberapa peralatan terkait pengelolaan agrowisata diantaranya, kios, kolam renang, gazebo, mushola, kamar mandi juga telah tersedia. Sedangkan fasilitas atraksi wisata seperti spot swafoto, jalur untuk *tour* wisata dalam kawasan agrowisata, kendaraan untuk mengajak wisatawan mengelilingi kawasan

agrowisata, peralatan edukasi dan *outbond* untuk menarik wisatawan belum tersedia. d. Sumber Daya Informasi dan Kewenangan; Ada dua bentuk informasi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan terhadap peraturan pemerintah dan undang-undang. Sedangkan kewenangan digunakan untuk menentukan bagaimana program yang dilakukan dan untuk membelanjakan atau mengatur keuangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa informasi telah disampaikan dengan baik melalui pembinaan, koordinasi dan sosialisasi yang bertujuan untuk pengelolaan serta pengembangan agrowisata tersebut. Sedangkan terkait peran pemerintah Kabupaten/Kecamatan maupun Desa dalam pengembangan Agrowisata Kebun Belimbing Tasikmadu adalah sebagai koordinator dan pembina. Harapan POKDARWIS/BUMDes terhadap peran pemerintah dalam pengembangan Agrowisata Kebun Belimbing Tasikmadu adalah mendukung baik secara moril maupun materiil melalui pembinaan manajemen pengelolaan agrowisata maupun bantuan sarana dan prasarana.

### **3. Disposisi**

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus mereka laksanakan. Terdapat dua indikator yang mempengaruhi disposisi, yaitu: a. Pengangkatan Birokrasi; Pengangkatan birokrasi adalah pemilihan dan penetapan keanggotaan tim teknis pelaksana implementasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada Tim Teknis/Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agrowisata Belimbing Tasikmadu. Sedangkan terkait proses perekrutan pengurus POKDARWIS dilakukan melalui musyawarah Desa yang kemudian dikukuhkan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. Sedangkan BUMDes, perekrutan dilaksanakan oleh Desa. b. Insentif; Insentif adalah uang yang diterima pelaksana sebagai ganti dari tanggung jawab yang sudah dilaksanakan dalam mengelola Agrowisata Belimbing Tasikmadu. Pemberian insentif bertujuan untuk meningkatkan memotivasi dan kinerja pelaksana pengembangan agrowisata sehingga tujuan program pengembangan agrowisata belimbing tasikmadu tercapai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada insentif atau honor bagi pengelola kawasan agrowisata belimbing yaitu POKDARWIS/ BUMDes maupun bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait selaku Pembina.

### **4. Struktur Birokrasi**

Struktur Birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi secara berulang-ulang dalam badan eksekutif yang memiliki hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam melaksanakan kebijakan (Mustanir, 2016). Ada dua indikator yang mempengaruhi struktur birokrasi, yaitu: a. *Standard Operational Procedures* (SOPs); *Standard Operating Procedures* (SOPs) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas (Winarno, 2005:150). Dalam pengelolaan kawasan agrowisata belimbing tasikmadu yang melibatkan lebih dari satu pengelola yaitu POKDARWIS/POKTAN dan

BUMDes sangat diperlukan SOP yang jelas sebagai pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan dalam rangka meminimalisir kesalahpahaman dan kesalahan pada proses pencapaian *goal* pengembangan kawasan agrowisata. SOP menjelaskan secara rinci proses kerja yang berlangsung secara rutin. Penerapan SOP sangat membantu pengelola kawasan agrowisata untuk mempertahankan kualitas proses proses usaha berlangsung stabil. Fungsi SOP adalah untuk memperlancar dan memperjelas alur pelaksanaan tugas, wewenang serta tanggungjawab unit kerja dalam pengelolaan kawasan agrowisata, sebagai dasar hukum apabila terjadi penyimpangan, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum ada SOP dalam pelaksanaan pengembangan kawasan agrowisata belimbing tasikmadu.

b. Fragmentasi; Fragmentasi adalah tersebarnya tanggungjawab kebijakan dalam unit-unit organisasi. Adanya penyebaran tanggungjawab kedalam unit-unit yang berbeda sehingga membutuhkan koordinasi. Semakin besar koordinasi yang dibutuhkan semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi suatu kebijakan atau program. Hal ini bisa dipahami mengingat koordinasi akan lebih mudah dilaksanakan apabila unit/stakeholder yang terlibat dalam implementasi pengembangan program atau kebijakan dalam jumlah kecil. Pengembangan kawasan agrowisata belimbing tasikmadu ini melibatkan berbagai stakeholder, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Tuban, Pemerintah Desa Tasikmadu, POKDARWIS/ POKTAN Lintang Tresno dan BUMDes Tasmad Mandiri, oleh karena itu dibutuhkan koordinasi yang baik mengingat belum dibentuknya Tim Teknis atau Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agrowisata Belimbing Tasikmadu. Sejauh ini komunikasi dengan Pemerintah Pusat telah terjalin namun belum ada realisasi bantuan dalam rangka pengembangan kawasan agrowisata. Sementara itu koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Tuban cukup baik terbukti dengan adanya pembinaan, pendampingan dan bantuan yang diberikan pada pengelola kawasan agrowisata belimbing tasikmadu.

#### **Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi**

a. Regulasi; Dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Tuban khususnya pengembangan Kawasan Agrowisata Belimbing Tasikmadu di Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, Pemerintah Kabupaten Tuban menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Selain itu Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga juga menerbitkan Keputusan Nomor 188.45/25/KPTS/414.102/2018 tentang Penetapan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Lintang Tresno Dusun pasekan Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban sebagai dasar hukum Kebijakan Pengembangan Kawasan Agrowisata Belimbing Tasikmadu di Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

b. Lokasi; Lokasi merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan obyek wisata. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan. Kawasan agrowisata belimbing tasikmadu berada di sebelah selatan Jalan Raya Tuban- Paciran, jalur pantura yang berstatus jalan

nasional yang merupakan penghubung Provinsi Jawa Timur.

c. Sarana dan Prasarana; Sarana dan prasarana juga memegang peranan penting dalam pengembangan obyek wisata. Wisatawan cenderung memilih mengunjungi obyek wisata yang memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai. Sarana dan prasarana ini memberikan kenyamanan dan kepuasan wisatawan ketika mengunjungi obyek wisata, sehingga mereka otomatis akan kembali mengunjungi obyek wisata tersebut dan membagikan pengalamannya kepada sanak saudara dan rekan. Kawasan agrowisata belimbing tasikmadu telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai, antara lain gapura pintu gerbang, akses jalan aspal menuju lokasi agrowisata, area parkir yang cukup luas, gazebo tempat bersantai dan beristirahat, kolam renang dan fasilitas yang lain yang disediakan untuk kenyamanan wisatawan.

d. Komoditas Unggulan Hortikultura Belimbing Tasikmadu; Belimbing Tasikmadu merupakan komoditas unggulan hortikultura Kabupaten Tuban yang telah mendapat Sertifikat Hak Paten dari Departemen Pertanian nomor 314/KPTS/SR.120/5/2007. Keunggulan belimbing tasikmadu ini adalah memiliki rasa yang manis seperti madu, tekstur daging yang lembut dan warna buah orange matang.

e. Kuliner; Kuliner merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan pengembangan wisata. Kuliner dapat menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung dan mengulangi kunjungannya ke obyek wisata. Kabupaten Tuban memiliki kuliner yang sangat beragam terutama olahan hasil laut. Karakteristik kuliner Kabupaten Tuban secara umum dipengaruhi oleh cita rasa masakan Jawa dengan ciri khas berbumbu pedas dan asin, rasa pedasnya tak tertandingi, bahkan sudah pernah diliput oleh beberapa media televisi nasional, antara lain kare rajungan, garang asem ndas manyung, becek menthok, ulas-ulas nus, ulas-ulas panggang ikan pe dan belut rica-rica. Sebagian kuliner tersebut tersedia di dalam area kawasan agrowisata belimbing tasikmadu.

f. Tiket Gratis; Salah satu terobosan yang dilakukan pengelola kawasan agrowisata belimbing tasikmadu adalah dengan menggratiskan tiket masuk dengan tujuan untuk menarik banyak wisatawan. Tiket masuk gratis ini juga merupakan salah satu promosi yang dilakukan dalam rangka memaksimalkan pengembangan kawasan agrowisata belimbing tasikmadu.

Pemerintah Kabupaten Tuban belum membentuk Tim Teknis/Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agrowisata Belimbing Tasikmadu Di Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban sehingga dalam pelaksanaannya pembinaan, pendampingan dan bantuan yang diberikan oleh OPD terkait masih bersifat parsial, tidak terpadu, karena itu implementasi kebijakan yang dilaksanakan belum optimal sebagai dampak masih adanya ego sektoral dari masing-masing OPD. Status lahan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan obyek wisata. Hal ini terkait kewenangan dan pengambilan kebijakan dalam pengembangan obyek wisata. Status lahan kawasan agrowisata belimbing bukan milik POKDARWIS/POKTAN dan BUMDes Tasmad Mandiri sehingga hal ini menghambat terkait kewenangan dan pengambilan kebijakan dalam rangka memaksimalkan pengembangan kawasan agrowisata belimbing tasikmadu. *Standard Operational Procedures*

(SOPs) Dalam pengelolaan kawasan agrowisata belimbing tasikmadu yang melibatkan lebih dari satu pengelola yaitu POKDARWIS/POKTAN dan BUMDes sangat diperlukan SOP yang jelas sebagai pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan dalam rangka meminimalisir kesalahpahaman dan kesalahan pada proses pencapaian *goal* pengembangan kawasan agrowisata. SOP menjelaskan secara rinci proses kerja yang berlangsung secara rutin. Fungsi SOP adalah untuk memperlancar dan memperjelas alur pelaksanaan tugas, wewenang serta tanggungjawab unit kerja dalam pengelolaan kawasan agrowisata juga sebagai dasar hukum apabila terjadi penyimpangan. Pengelolaan kawasan agrowisata ini belum dilengkapi dengan SOP yang jelas, hal ini dapat menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan pengembangan kawasan agrowisata ini. Fasilitas atraksi wisata merupakan sarana penunjang kepariwisataan yang berfungsi untuk membuat wisatawan tertahan lebih lama dan agar lebih banyak mengeluarkan uang di obyek wisata yang dikunjungi. Pembangunan fasilitas atraksi wisata di daerah tujuan wisata maupun obyek wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan baik secara kualitas maupun jumlah. Fasilitas atraksi wisata di kawasan agrowisata belimbing tasikmadu masih sangat terbatas. Kendaraan untuk berkeliling kebun belimbing belum tersedia begitu pula peralatan untuk *outbond* serta fasilitas bermain anak yang belum memadai. Ketersediaan Produk di belimbing tasikmadu tidak selalu melimpah sepanjang tahun hal ini berkaitan dengan siklus tanam dan panen, sehingga menimbulkan kekecewaan bagi wisatawan yang mengunjungi kawasan agrowisata yang tidak dapat merasakan sensasi petik buah belimbing, namun begitu pengelola kawasan agrowisata telah menyediakan produk olahan belimbing yang memiliki rasa tidak kalah lezat dan tentu saja dengan masa kadaluarsa yang lebih lama bila dibanding buah segar. Promosi sebagai faktor penting yang lain dalam pengembangan wisata adalah promosi. Promosi dilakukan dengan tujuan untuk menarik wisatawan mengunjungi daerah obyek wisata. Promosi dapat dilakukan dengan cara konvensional maupun melalui media digital. Pemerintah Kabupaten Tuban maupun pengelola kawasan agrowisata belimbing tasikmadu telah melaksanakan promosi, namun lebih banyak dilaksanakan secara konvensional yaitu pada saat peresmian agrowisata belimbing tasikmadu, papan penunjuk lokasi agrowisata belimbing dan melalui brosur yang dititipkan pada sejumlah hotel di wilayah Kabupaten Tuban. Promosi melalui media digital belum banyak dilakukan karena terkait keterbatasan anggaran.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agrowisata Belimbing Tasikmadu di Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dengan menggunakan model implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III dengan 4 variabel, yaitu (1) variabel Komunikasi, (2) variabel Sumber Daya, (3) variabel Disposisi, dan (4) variabel Struktur Birokrasi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan pengembangan kawasan agrowisata belimbing tasikmadu di Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban sudah

dilaksanakan namun masih belum optimal baik dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

2. Faktor Pendukung implementasi kebijakan pengembangan kawasan agrowisata belimbing tasikmadu di Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, yaitu adanya regulasi sebagai dasar hukum program pengembangan kawasan agrowisata belimbing tasikmadu di Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban; berada di lokasi yang sangat strategis, dekat dengan jalan Raya Tuban-Paciran, jalur pantura merupakan akses yang sangat mudah dijangkau dengan semua kendaraan; sarana dan prasarana yang memadai; kualitas dan rasa buah Belimbing Tasikmadu yang manis dan segar yang telah memiliki Sertifikat Hak Paten dari Departemen Pertanian nomor 314/KPTS/SR.120/5/2007; kuliner olahan hasil laut yang berbumbu khas Tuban yaitu asin dan pedas; dan tiket gratis. Sedangkan faktor penghambat implementasi kebijakan pengembangan kawasan agrowisata belimbing tasikmadu di Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, yaitu tidak ada Tim Teknis atau Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agrowisata Belimbing Tasikmadu; status kepemilikan lahan kebun belimbing tasikmadu yang merupakan milik perorangan dan bukan milik POKDARWIS atau BUMDes; tidak ada SOP sebagai pedoman pengelola dalam melaksanakan tugas pengelolaan kawasan agrowisata belimbing tasikmadu; fasilitas atraksi wisata terbatas; ketersediaan buah belimbing tasikmadu yang tidak selalu melimpah sepanjang tahun; dan promosi yang belum maksimal.

## **REKOMENDASI**

Berdasarkan uraian hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan dapat disampaikan beberapa rekomendasi dalam rangka mendukung keberhasilan pengembangan Kawasan Agrowisata Belimbing Tasikmadu di Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, sebagai berikut: 1. Agar segera dibentuk Tim Teknis atau Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agrowisata Belimbing Tasikmadu dengan tujuan agar pembinaan dan dukungan dalam rangka mengembangkan kawasan agrowisata ini dapat berjalan secara terpadu. 2. Untuk kelancaran pengembangan Kawasan Agrowisata Belimbing Tasikmadu, agar segera dirumuskan *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang pengelolaan Kawasan Agrowisata Belimbing Tasikmadu antara pengelola kawasan agrowisata dengan pemilik lahan. 3. Perlu segera dirumuskan dan dibuat serta disosialisasikan *Standard Operational Procedures* (SOPs) kepada seluruh anggota dan pengurus POKDARWIS dan BUMDes sebagai pedoman kerja dalam mengembangkan kawasan agrowisata. 4. Dalam rangka mengoptimalkan pengembangan agrowisata belimbing tasikmadu agar dilaksanakan promosi secara maksimal baik secara konvensional maupun melalui media digital, selain itu dapat juga ditempuh dengan cara pemaketan wisata dengan obyek wisata populer terdekat, antara lain Wisata Pantai Kelapa Panyuran, Wisata Pantai Boom, Wisata Religi Makam Sunan Bonang dan Makam Syekh Maulana Malik Ibrahim Asmoroqondi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik. (2018). *Kabupaten Tuban dalam Angka Tahun 2018*. Tuban: CV. Niad.
- Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Edward, G.E. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustanir, Ahmad. dan Darmiah. (2016). *Implementasi Kebijakan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang*. Jurnal Politik Profetik Volume 04 Nomor 2:225-238. ISSN: 2337-4756.
- Subarsono, A. (2015). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widodo. (2010). *Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Winarno, Budi. (2005). *Teori & Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

#### **PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**

- Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.
- Peraturan Bupati Tuban Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan
- Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban Nomor 188.45/25/KPTS/414.102/2018 Tentang Penetapan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Lintang Tresno Dusun Pasekan Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.
- Keputusan Kepala Desa Tasikmadu Nomor 188.45/21/KPT/414.412.14/2017 Tentang Susunan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Tasmad Mandiri Periode 2017-2022.